

# **LAPORAN PENELITIAN**

**CONCEPTUAL STUDY : COMMUNITY BASED  
TOURISM IN ISLAMIC PERSPECTIVE**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**Disusun Oleh**

**Muhammad Fakhri Al-kahfi, M.A. (Ketua )**

**Nisa Rahma Fadila, S.El.,M.A.(Anggota)**

**DILAKSANAKAN ATAS BIAYA:  
DIPA UNIVERSITAS TERBUKA SESUAI SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NOMOR :  
B/1552/UN31.LPPM/PT.01.03/2024  
TANGGAL 09 SEPTEMBER 2024**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TERBUKA  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Permasalahan .....	6
3. Tujuan Penelitian .....	6
3. Luaran Penelitian .....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Community Based Tourism .....	7
B. Maqoshid Syariah .....	9
C. Desa Wisata Pahawang .....	10
BAB III .....	12
METODOLOGI.....	12
A. Jenis Penelitian.....	12
B. Tahapan Penelitian.....	12
C. Pengumpulan Data.....	13
D. Roadmap Penelitian .....	13
BAB IV .....	15
PEMBAHASAN.....	15
A. Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat.....	15
B. Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat.....	17
BAB V .....	22
KESIMPULAN.....	22
DAFTAR PUSTAKA .....	23

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan suatu konsep Community Based Tourism yang memadukan konsep Maqoshid Syariah yang dapat diterapkan di Indonesia dan negara-negara lain yang berpenduduk muslim besar. Metode penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan studi pustaka dengan mengumpulkan data-data pendukung dari jurnal, buku, dan metode-metode evaluasi produk-produk relevan yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan penerapan sistem Islamic Community Based Tourism (ICBT). Selain itu, hasil penelitian ini menjadi rekomendasi konsep-konsep manajemen pariwisata kepada para pengelola pariwisata agar pariwisata dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pariwisata yang besar dan memerlukan konsep manajemen yang baik agar dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar kawasan wisata, salah satu konsep yang terbaik untuk diterapkan dalam manajemen pariwisata adalah konsep Community Based Tourism. Hasil penelitian ini menawarkan suatu konsep baru yaitu Islamic Community Based Tourism yang merupakan penerapan Maqoshid Syariah pada konsep CBT mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang besar sehingga menuntut konsep CBT untuk dapat menyesuaikan dengan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Kata Kunci:** Potensi Pariwisata, Maqoshid Syariah, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Umat Islam

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, dari segi geografi Indonesia memiliki 13.677 pulau yang membentang dari barat ke timur dan 6.004 diantaranya dihuni oleh manusia. Melihat dari jumlah yang besar tersebut maka Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan dapat menjadi daya tarik bagi Indonesia. Namun potensi pariwisata yang besar tersebut belum diikuti dengan pengelolaan yang baik sehingga banyak potensi pariwisata tersebut yang belum dinikmati oleh para wisatawan dan juga belum memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, berkembang konsep pengelolaan pariwisata yang menitikberatkan pada peran serta penduduk lokal dalam pengelolaan potensi pariwisata setempat yang dikenal dengan konsep CBT (Community Based Tourism). Community Based Tourism merupakan pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat lokal yang tinggi dan bertanggung jawab dari aspek sosial dan lingkungan (CIFOR, 2004).

Konsep CBT memungkinkan peran serta masyarakat lokal dalam mengelola potensi pariwisata di daerahnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Selain itu konsep CBT dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan mengurangi tingkat kemiskinan, dimana pendapatan dari pariwisata berasal dari jasa pariwisata kepada wisatawan seperti biaya pemanduan, kerajinan, homestay dan lain sebagainya. Maka konsep ini sangat baik jika dijalankan dengan benar. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konsep CBT juga menjadi jalan keluar dari hilangnya potensi pariwisata di daerah pedesaan yang belum mampu diakomodir oleh pemerintah daerah maupun pusat, sehingga konsep CBT dapat menyelamatkan potensi pariwisata di suatu daerah.

Produk Pariwisata Intangible dalam menyusun suatu paket wisata yang siap dinikmati sepenuhnya oleh wisatawan harus dipersiapkan mulai dari tema, atraksi yang ditawarkan, aksesibilitas, amenitas, aktivitas, dan akomodasi (Christou, Farmaki, Saveriades, & Spanuo, 2019). Paket-paket yang ditawarkan harus menasar segmen yang tepat dan memiliki nilai lebih dibandingkan destinasi sejenis. Sebab biasanya, atraksi destinasi yang bersumber dari alam biasanya hampir sama, namun sesuatu yang intangible akan membuat wisatawan memiliki pengalaman perjalanan yang nantinya akan diteruskan atau direkomendasikan kepada saudara maupun kolega. Jaminan mutu pelayanan dan pengalaman perjalanan harus benar-

benar diakomodir oleh pengelola suatu objek wisata di suatu destinasi wisata (Soliman & Cardoso, 2021). Aspek mutu pelayanan dan pengalaman wisata mengacu pada totalitas kegiatan pengelolaan dan respon yang cermat terhadap kebutuhan jasa pariwisata untuk menghasilkan suatu pengalaman perjalanan yang total yang dinikmati oleh wisatawan (Chandralal & Valenzuela, 2013).

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam budaya memiliki berbagai macam kearifan lokal yang dapat menjadi potensi wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan demikian, keragaman kearifan lokal tersebut menjadi penting dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan. Pemanfaatan kearifan lokal sebagai potensi wisata memberikan peran kepada masyarakat untuk memperkenalkan sekaligus menumbuhkan apresiasi dan kepekaan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, serta tradisi lokal (Kautsar & Gunawan, 2017). Kebudayaan merupakan basis pembangunan pariwisata Indonesia. Pembangunan destinasi wisata sebagai salah satu pilar pembangunan pariwisata nasional hakikatnya adalah pemanfaatan warisan budaya itu sendiri. Salah satu sektor pariwisata di tanah air yang diminati oleh wisatawan adalah wisata budaya yang berbasis pada keunikan tradisi dan kearifan lokal suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan kepariwisataan yang mengedepankan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa, nilai-nilai keagamaan, serta kelestarian dan kualitas lingkungan hidup harus melibatkan unsur-unsur budaya suatu daerah serta dapat memberikan kontribusi bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya harus melibatkan unsur-unsur budaya suatu daerah serta dapat memberikan kontribusi bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya (Kim, Whitford, & Arcodia, 2019).

Wisata Pahawang di Lampung adalah destinasi terkenal yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Pahawang Besar dan Pahawang Kecil, yang terletak di Teluk Lampung. Pulau-pulau ini menawarkan keindahan alam yang memukau, terutama pantai berpasir putih dan air laut yang jernih, yang ideal untuk snorkeling dan diving. Pengunjung dapat menikmati keindahan terumbu karang yang masih alami, serta berbagai biota laut seperti ikan badut dan anemon. Selain kegiatan air, wisatawan juga dapat berkeliling pulau, menikmati pemandangan alam, dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Pahawang telah menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Lampung karena keindahan alam bawah lautnya dan suasana yang masih alami.

Di negara yang berpenduduk muslim besar, konsep CBT seharusnya disesuaikan dengan tuntutan agama, dalam hal ini Maqoshid Syariah menjadi indikator terlaksananya

konsep CBT, sehingga akan terciptalah konsep baru Islamic Community Based Tourism (ICBT). Konsep ini dalam pelaksanaannya berlandaskan pada penerapan Maqoshid Syariah. Menurut al-Kurdi Maqoshid Syariah adalah al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam yang artinya nilai-nilai yang menjadi tujuan pembuatan hukum. Sebagai landasan putusan dalam rangka menetapkan hukum, maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pertimbangan maqoshid syariah menjadi penting untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak ditemukan secara tegas dalam Al-Quran maupun Hadits (Mayangsari & Noor, 2014). Tujuan dari Maqoshid Syariah sendiri adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh bagi umat manusia, kesejahteraan manusia terletak pada terpeliharanya agama, diri, akal, keturunan, dan harta manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menganalisis teori Community Based Tourism dan juga teori maqoshid syariah serta menggabungkannya untuk mendapatkan rekomendasi konsep pengelolaan pariwisata yang baru. Pada penelitian sebelumnya, penelitian menjelaskan tentang penerapan konsep CBT dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan pandangan baru tentang penerapan konsep CBT yang dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Maka dengan adanya konsep maqoshid syariah dalam konsep CBT diharapkan konsep tersebut dapat menjamin kesejahteraan yang dituangkan dalam maqoshid syariah, tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual. Selain itu, hasil penelitian ini menjadi rekomendasi konsep manajemen pariwisata kepada para pengelola pariwisata agar pariwisata dapat dikelola dengan baik.

## **B. Permasalahan**

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pariwisata berbasis masyarakat di terapkan di Desa Wisata Pahawang?
2. Bagaimana implementasi Maqashid Syariah dalam pariwisata berbasis masyarakat?

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Implementasi pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Pahawang
2. Konsep pariwisata halal berbasis masyarakat

## **3. Luaran Penelitian**

Adapun luaran dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dipublikasikan di Jurnal Ilmiah terakreditasi Sinta 5 dan 6

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Community Based Tourism**

Pola pariwisata berbasis masyarakat merupakan pola pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat lokal yang tinggi, dan juga akuntabilitas dari aspek sosial dan lingkungan (CIFOR, 2004), pariwisata berbasis masyarakat merupakan usaha pariwisata yang menitikberatkan pada peran serta aktif masyarakat. Menurut Verhangen (Murdiyanto, 2011) mengatakan bahwa partisipasi merupakan bentuk interaksi dan komunikasi khusus yang berkaitan dengan pembagian wewenang, tanggung jawab, dan manfaat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam dan juga budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi mutlak. CBT umumnya hanya berskala kecil dan melibatkan masyarakat lokal sebagai pengelola wisata dan cocok diterapkan di daerah pedesaan yang memiliki potensi wisata yang belum maksimal. Oleh karena itu fokus CBT adalah pada pengenalan budaya lokal dan pengelolaan lingkungan hidup daerah tersebut. Secara internasional ada beberapa yang berbeda yang digunakan untuk Community based-Tourisme seperti Rural Tourisme, Eco Tourime dan Suistanable Tourisme (pariwisata berkelanjutan). Beberapa aspek penting dari pariwisata berbasis masyarakat (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009):

- a. Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk melakukan pengelolaan pariwisata di wilayahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat (nilai partisipasi publik dan edukasi).
- b. Prinsip kepemilikan lokal (kepemilikan dan pengelolaan oleh masyarakat lokal) diterapkan pada sarana dan prasarana pariwisata, kawasan wisata, dan lain-lain (nilai partisipasi masyarakat).
- c. Homestay menjadi pilihan utama untuk fasilitas akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi).
- d. Pemandu wisata merupakan masyarakat lokal (nilai partisipasi masyarakat).
- e. Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan pariwisata menjadi tanggung jawab masyarakat setempat, termasuk penetapan retribusi bagi wisatawan (ekonomi dan pariwisata)

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan harapan untuk membagi keuntungan sektor

pariwisata secara merata dan dapat langsung diterima oleh masyarakat karena selama ini mayoritas pendapatan masyarakat hanya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Padahal dengan tingginya kunjungan wisatawan di daerah tersebut seharusnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, maka dengan adanya pariwisata berbasis masyarakat diharapkan dapat memperoleh tambahan pendapatan dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam berkurang.

Pariwisata berbasis masyarakat bertumpu pada partisipasi inisiatif dan kerjasama berbagai pihak seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, pelaku usaha pariwisata, serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian di semua tahapan. Dalam pengembangannya, pariwisata berbasis masyarakat ini memerlukan pendampingan, pendampingan masyarakat sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat terlibat dalam seluruh proses pengembangan mulai dari tahap perencanaan. Masyarakat menjadi kunci bagi pengembangan model pariwisata ini. Partisipasi inisiatif menurut Hobley (Jariyah, 2014) adalah partisipasi masyarakat melalui pengambilan inisiatif secara mandiri dari lembaga luar untuk membuat perubahan sistemik. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga luar mengenai sumber daya dan teknik yang mereka butuhkan, dan juga mengawasi bagaimana sumber daya ini digunakan.

Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dikembangkan oleh Murphy dalam *Tourism: A Community Approach* (1985). Ia berpendapat bahwa produk pariwisata harus dilihat oleh masyarakat lokal yang kerap kali bersinggungan dengan dampak pariwisata. Untuk itu, pengelolaan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal dan menjadikan mereka sebagai salah satu produk kegiatan pariwisata. Selain itu, industri pariwisata juga harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, karena secara tidak langsung masyarakat lokal akan menanggung dampak kumulatif dari kegiatan pariwisata dan juga memberikan masukan yang besar kepada mereka. (Murphy, 1985).

Tim Bahaire & Elliot White dalam *Community Participation in Tourism Planning and Development in The Historic City of York, England* memberikan kritik terhadap penerapan konsep CBT dan munculnya partisipasi publik dalam kegiatan pariwisata, perencanaan destinasi pariwisata masih berpusat pada tujuan komersial dan keterlibatan masyarakat masih sangat kecil sehingga penerapan konsep ini berorientasi bisnis dan dengan pendekatan berorientasi ekonomi (Bahaire & White, 1999). Penelitian yang dilakukan oleh Emma Hijriati dan Rina Mardiana dengan judul *Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat terhadap Kondisi Ekologi, Sosial, dan Ekonomi Desa Batusuhunan, Sukabumi* menjelaskan bahwa ekowisata

berbasis masyarakat berdampak pada perubahan ekologi dan sosial. Pada aspek ekologi, warga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Pada aspek sosial, terjadi peningkatan kerjasama masyarakat dalam sektor ekowisata (Hijriati & Mardiana, 2014)

Muhammad Syafi'i dan Djoko Suwandono dalam Konsep Perencanaan Desa Wisata Pendekatan Community Based Tourism menjelaskan bahwa dalam jurnal ini rekomendasi pengembangan potensi wisata di Desa Bedono dengan menggunakan konsep CBT, rekomendasi tersebut antara lain: 1) melibatkan masyarakat dalam pengembangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 2) mengembangkan wisata yang unik dengan potensi alam dan budaya masyarakat 3) membentuk organisasi masyarakat 4) membangun koordinasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat 5) pendampingan masyarakat untuk mengawal proses 6) peningkatan kapasitas masyarakat (Syafi'i & Suwandono, 2015).

## **B. Maqoshid Syariah**

Konsep Maqoshid Syariah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum, seiring perkembangan zaman banyak sekali permasalahan yang muncul sehingga perlu landasan yang tepat dalam memberikan solusi untuk mengatasinya. Ulama kontemporer membagi maqoshid menjadi tiga tingkatan, yaitu: maqoshid 'amah (tujuan umum), maqoshid khassah (tujuan khusus), dan maqoshid juz'iyah (tujuan khusus) (Auda, 2007). Maqoshid 'amah adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi atau sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, dan kemudahan. Maqoshid khassah adalah nilai yang ingin diwujudkan dalam bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan wanita dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan memberikan efek jera dalam hukuman, menghilangkan gharar (ketidakjelasan) dalam mu'amalat, . Sedangkan maqoshid juz'iyah adalah tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan dalam fikih hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam pemberian kesaksian lebih dari satu orang, memungkinkan adanya kesulitan hukum tidak boleh berpuasa bagi orang yang tidak mampu berpuasa, bepergian, atau yang lainnya.

Di sisi lain, piramida maqoshid syariah terdiri atas tiga tingkatan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah (Auda, 2007). Sedangkan kajian ulama klasik, maqoshid syariah dalam menjadikan syariat Islam menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa dirangkum dalam menjaga lima hal utama dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-

nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Al-Ghazali menyebutnya dengan al-kulliyah al-khamsah yang menurutnya dianggap sebagai usulan syariah dan merupakan tujuan umum dibuatnya syariah.

### **C. Desa Wisata Pahawang**

Desa Wisata Pahawang yang terletak di Kabupaten Pesawaran, Lampung, menawarkan keindahan alam yang memukau sekaligus pengalaman wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Terkenal dengan kekayaan baharinya, Pahawang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Pahawang Besar dan Pahawang Kecil. Desa ini memiliki pesona alam yang memikat, mulai dari perairan biru jernih hingga hamparan terumbu karang yang memanjakan mata. Selain menjadi destinasi wisata, Pahawang juga menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat lokal dapat berperan penting dalam menjaga kelestarian alam sambil meningkatkan taraf hidup melalui sektor pariwisata.

Keunggulan utama Desa Wisata Pahawang terletak pada keindahan bawah lautnya yang memikat hati para pecinta snorkeling dan menyelam. Spot populer seperti Taman Nemo menyajikan panorama bawah laut yang dihuni ikan-ikan badut (clownfish) di antara anemon laut. Hal yang membedakan Pahawang dari destinasi lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut melalui program konservasi terumbu karang. Penduduk lokal aktif berpartisipasi dalam penanaman terumbu karang buatan, yang tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati tetapi juga menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan terjaga berkat sinergi antara pariwisata dan upaya konservasi.

Kontribusi masyarakat juga terlihat dalam pengelolaan fasilitas wisata yang berbasis komunitas. Sebagian besar penginapan di Desa Pahawang berupa homestay yang dikelola langsung oleh penduduk lokal. Melalui homestay, wisatawan dapat merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir, seperti cara mereka menangkap ikan, memasak makanan khas, hingga membuat kerajinan dari hasil laut. Penduduk juga menawarkan jasa pemandu wisata untuk aktivitas laut, seperti snorkeling dan island hopping, yang memberikan pengalaman personal dan mendalam bagi para pengunjung. Interaksi ini menciptakan hubungan harmonis antara wisatawan dan penduduk setempat, memperkuat kesan otentik desa wisata ini.

Selain pengelolaan wisata, masyarakat Desa Pahawang juga berkontribusi melalui upaya pelestarian budaya dan tradisi lokal. Berbagai kegiatan seni dan budaya, seperti pertunjukan musik tradisional Lampung, turut dipromosikan sebagai daya tarik wisata.

Kuliner khas seperti ikan bakar, pindang patin, dan sambal Lampung, yang disajikan oleh penduduk lokal, menjadi daya tarik tersendiri yang memanjakan lidah wisatawan. Dengan kontribusi aktif masyarakat dalam berbagai aspek, Desa Wisata Pahawang tidak hanya menjadi destinasi ekowisata yang berkelanjutan tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan lokal yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya.

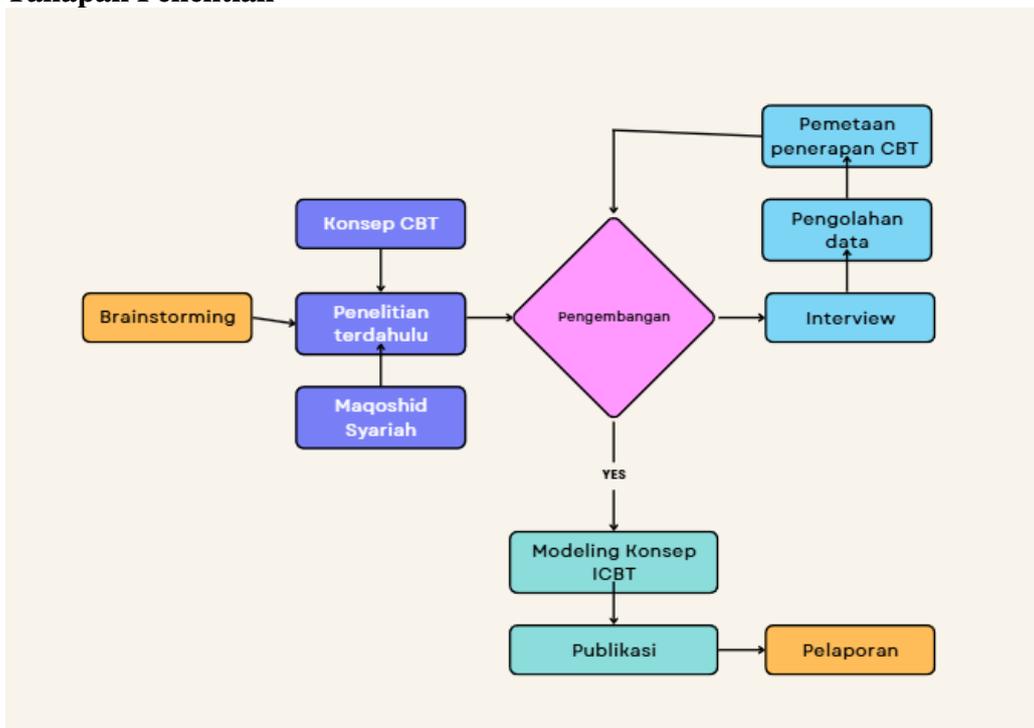
## BAB III

### METODOLOGI

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena tertentu secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif yang berasal dari pengalaman, pandangan, atau perilaku individu dalam konteks spesifik. Pendekatan ini sering menggunakan in-depth interview sebagai metode utama untuk menggali informasi yang kaya dan mendalam dari narasumber. In-depth interview memungkinkan peneliti untuk menjelajahi secara detail perspektif, motivasi, dan makna yang diberikan oleh individu terhadap fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, atau insight yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### B. Tahapan Penelitian



Proses dimulai dengan tahap brainstorming, di mana ide utama penelitian digali dan diorganisasikan. Brainstorming mencakup eksplorasi tiga elemen utama, yaitu konsep CBT sebagai dasar pengembangan model pariwisata berbasis komunitas, penelitian terdahulu yang memberikan gambaran referensi dan landasan teori, serta maqashid syariah yang menjadi prinsip panduan untuk memastikan konsep ini selaras dengan nilai-nilai Islam. Tahap ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual awal yang menjadi acuan dalam penelitian.

Tahap berikutnya adalah pengembangan, yang merupakan inti dari penelitian. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data melalui berbagai metode, seperti pemetaan penerapan CBT, pengolahan data, dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan masyarakat lokal dan pihak-pihak terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara menyeluruh untuk mengembangkan prototipe model CBT yang sesuai dengan kebutuhan komunitas sekaligus mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah.

Langkah terakhir adalah modeling konsep ICBT (Integrasi CBT) sebagai hasil akhir penelitian. Model ini kemudian dipublikasikan dalam jurnal akademik atau media lain untuk menyebarkan temuan penelitian, sekaligus disampaikan dalam bentuk pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pengambil kebijakan atau pelaku industri pariwisata. Diagram ini secara sistematis menunjukkan pendekatan penelitian berbasis kombinasi teori dan praktik, dengan tujuan untuk menghasilkan model pariwisata berbasis komunitas yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi tetapi juga selaras dengan prinsip

### **C. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data melalui in-depth interview dengan Ketua Pokdarwis Desa Wisata Pahawang dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai penerapan Community-Based Tourism (CBT) dan implementasi nilai-nilai keislaman yang berbasis indikator maqashid syariah. Wawancara ini dirancang dengan panduan wawancara semi-terstruktur yang mencakup beberapa aspek utama, seperti peran masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, keterlibatan komunitas dalam menjaga kelestarian lingkungan, strategi promosi budaya lokal, dan pelaksanaan prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Peneliti berupaya menciptakan suasana diskusi yang terbuka dan nyaman untuk menggali pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh Pokdarwis dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam praktik CBT. Data yang diperoleh dari wawancara ini selanjutnya dianalisis secara tematik untuk memahami sejauh mana CBT diimplementasikan sesuai dengan maqashid syariah dan untuk mengidentifikasi rekomendasi peningkatan penerapan kedua konsep tersebut.

### **D. Roadmap Penelitian**

Penelitian ini menjadi awal dari roadmap penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya akan berfokus pada tantangan global dan respon CBT terhadap isu dan permasalahan global serta hubungannya dengan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

# ROADMAP PENELITIAN

Community Based Tourism



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Konsep CBT sudah mulai diterapkan di Indonesia sebagai salah satu solusi atas dislokasi potensi pariwisata di Indonesia. Dalam penerapannya, daerah yang menerapkan konsep CBT didominasi oleh daerah yang memiliki potensi namun belum sepenuhnya dieksploitasi dan dikelola oleh pemerintah. Masyarakat Karangeneng di Kabupaten Sleman dalam mengembangkan pariwisata tidak lepas dari karakteristik kegiatan masyarakat yang ada, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial budaya. Dan juga dalam pengembangannya tidak lepas dalam melibatkan unsur-unsur yang ada diikuti dengan pemahaman terhadap karakteristik dan tatanan sosial budaya yang ada (Murdiyanto, 2011).

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, konsep CBT juga diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi budaya dan sumber daya alam. Penerapan konsep CBT diterapkan dengan cara menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di wilayah perencanaan kemudian langkah selanjutnya adalah penyusunan strategi. Dalam skema pengelolaan, seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa, membantu memberikan arahan dan dukungan kepada berbagai kelompok yang terbentuk di tingkat masyarakat setempat agar tercipta daya saing yang kuat. (Syafi'i & Suwandono, 2015).

Menurut (Prasta, 2021), Pariwisata berbasis masyarakat memiliki prinsip sebagai berikut: 1) Kelestarian lingkungan yang terjamin; 2) Kebanggaan masyarakat ikut dipromosikan; 3) Keterlibatan sejak awal anggota masyarakat dalam setiap aspek; 4) Peningkatan kualitas hidup; 5) Mengakui, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat atas wisata; 6) Melestarikan keunikan karakter dan budaya daerah setempat; 7) Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia; 8) Membina pembelajaran lintas budaya; 9) Mendistribusikan hasil yang didapat secara adil di antara anggota masyarakat; 10) Menyumbangkan perolehan pendapatan tetap untuk proyek-proyek komunitas.

Terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009) antara lain:

1. Keberlanjutan pariwisata dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (prinsip

konservasi dan partisipasi masyarakat).

Pariwisata harus bertujuan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mengutamakan langkah-langkah konservasi, suatu kegiatan bisnis yang bertujuan menyediakan alternatif ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan pariwisata, serta berpartisipasi penuh dalam konservasi dengan meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap perlindungan lanskap yang memiliki nilai biologis, ekologis, dan historis yang tinggi.

#### 2. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan masyarakat setempat (prinsip partisipasi masyarakat).

Aspek organisasi dan berbasis masyarakat dalam manajemen pariwisata berbasis masyarakat menjadi isu utama, yaitu dukungan berkelanjutan dari para profesional dalam memperkuat organisasi lokal secara berkelanjutan, mempromosikan kemandirian dan menciptakan kemitraan yang adil dalam pengembangan pariwisata.

#### 3. Ekonomi berbasis masyarakat (Prinsip partisipasi masyarakat)

Dalam pariwisata berbasis masyarakat, perputaran ekonomi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, salah satu instrumen yang digunakan dalam menambah pendapatan dalam pariwisata adalah dengan Homestay. Homestay merupakan salah satu sistem akomodasi yang sering digunakan dalam pariwisata, dapat meliputi berbagai jenis akomodasi dari penginapan sederhana yang dikelola langsung oleh keluarga sampai dengan menginap di rumah keluarga setempat. Selain tidak memerlukan modal yang besar, pemilik rumah dapat langsung merasakan manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan, dan penyaluran manfaat kepada masyarakat pun terjamin. Homestay memiliki nilai yang tinggi sebagai salah satu produk pariwisata dimana seorang wisatawan mendapatkan kesempatan untuk mengenal alam, budaya masyarakat dan kehidupan sehari-hari di lokasi pariwisata. Selain itu produk pariwisata Homestay juga dapat menawarkan jasa berupa pemandu wisata, pemandu wisata yang berasal dari masyarakat setempat lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang lingkungan dan alam setempat. Dan juga nantinya pemandu wisata setempat akan dapat merasakan secara langsung dampak dari pariwisata berbasis masyarakat.

#### 4. Prinsip edukasi

Pariwisata memberikan banyak peluang untuk memperkenalkan kepada wisatawan tentang pentingnya menjaga alam dan menghargai budaya setempat. Dalam pendekatan pariwisata, pusat informasi menjadi penting dan dapat pula menjadi pusat kegiatan dengan tujuan meningkatkan nilai pengalaman wisatawan yang dapat memperoleh informasi lengkap tentang

lokasi atau daerah dalam hal budaya, alam, dan menyaksikan acara kesenian, kerajinan, dan produk budaya lainnya..

## **B. Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa maqoshid syariah merupakan suatu konsep yang menjelaskan tujuan adanya suatu hukum dan juga untuk memajukan kesejahteraan seluruh umat manusia, dimana kesejahteraan akan terwujud apabila kelima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah:

- a. Menjaga agama
- b. Menjaga jiwa
- c. Menjaga akal
- d. Menjaga keturunan
- e. Menjaga harta

Kelima pokok di atas yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai al-kulliyah al-khamsah jika diimplementasikan dalam konsep CBT akan membawa konsep baru pada konsep CBT, dan menciptakan konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat Islam. Adapun Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Islam adalah sebagai berikut:

### **1. Implementasi pariwisata halal**

Menjaga agama merupakan unsur utama dalam menjadikan kegiatan pariwisata berbasis masyarakat memiliki unsur keislaman yang kuat. Pandangan umum dalam kegiatan pariwisata adalah bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki kerentanan terhadap tindakan maksiat, oleh karena itu dalam penerapan Maqoshid Syariah dalam kegiatan pariwisata harus benar-benar diperhatikan. Untuk menjaga agama dalam kegiatan pariwisata, pengelola harus menerapkan konsep pariwisata syariah yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, baik wisatawan maupun pengelola. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat Islam antara lain: (Ulum, 2019):

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk beribadah. Penyediaan tempat ibadah penting untuk menjaga keberagaman dalam kegiatan pariwisata, wisatawan dapat melaksanakan ibadah dengan baik selama kunjungannya karena pengelola wisata menyediakan sarana dan prasarana yang baik sehingga wisatawan tidak perlu keluar dari kawasan wisata hanya untuk melaksanakan ibadah..

- b. Menyediakan makanan halal. Makanan halal merupakan kebutuhan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata, dengan tersedianya makanan tersebut wisatawan tidak perlu bingung lagi untuk mendapatkan makanan halal selama berkunjung ke tempat wisata..
- c. Menghindari pornografi, pornoaksi, perzinaan, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa tempat wisata terkadang dilekatkan pada kegiatan yang dilarang oleh agama sehingga dapat mengganggu wisatawan dengan kegiatan tersebut. Dalam UU No. 1 Tahun 2009, pengelola wajib melarang segala bentuk kegiatan tersebut agar tidak mengganggu kegiatan pariwisata..

## 2. Tourist Information Center (TIC)

Pariwisata berbasis Islam seharusnya aman bagi wisatawan dan pengelola. Untuk menciptakannya diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kegiatan pariwisata seperti adanya tim SAR, pengawas pantai, pemasangan rambu-rambu yang terkait dengan keselamatan, dan lain sebagainya. Sehingga apabila hal tersebut terlaksana maka kegiatan pariwisata dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Peran Tourist Information Center (TIC) tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kegiatan pariwisata, dengan memaksimalkan peran service center akan memberikan kenyamanan kepada wisatawan dalam melakukan kunjungan ke objek wisata.

Pusat Informasi Turis yang baik harus memiliki karakteristik informasi yang menciptakan kenyamanan bagi wisatawan, karakteristik tersebut mampu memberikan informasi yang relevan, bermanfaat, dan tepat waktu. Petugas dapat menanyakan kepada wisatawan mengenai kebutuhan kunjungan sehingga dapat menentukan tindakan yang tepat dalam kegiatan pariwisata dan memberikan pengalaman yang baik bagi mereka (Gianina, Prasetya, & Dewantara, 2016). Selain itu, Pusat Informasi Turis yang baik akan memberikan efek berganda bagi kunjungan wisatawan lain yang mendapatkan informasi dari kunjungan sebelumnya maupun informasi yang disediakan oleh Pusat Informasi Turis (TIC).

## 3. Pelestarian Intelektual Lokal

Pariwisata berbasis masyarakat Islam menciptakan konsep yang sangat menjunjung tinggi kekayaan masyarakat lokal dan wisatawan. Kekayaan intelektual masyarakat lokal dapat dilestarikan dengan membuat program yang dapat melestarikan kekayaan intelektual seperti membuat kerajinan tradisional, seni, pengetahuan tradisional, dan sebagainya. Dengan program ini, kekayaan intelektual masyarakat akan tetap terjaga dan wisatawan juga dapat mempelajari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Kekayaan intelektual masyarakat setempat dapat juga disebut dengan local genius, local genius merupakan pengetahuan yang diciptakan oleh masyarakat setempat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat setempat itu sendiri. Selain itu local genius juga dapat dikatakan sebagai human capital, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada diri manusia (Massis, 2015). Pemanfaatan local genius akan menciptakan suatu siklus yang melestarikan kekayaan local genius yang mungkin menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat setempat. Pemanfaatan local genius dalam bentuk kerajinan dan kegiatan akan menciptakan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan teknologi, hal ini dikarenakan pemanfaatan local genius akan menciptakan produk asli buatan masyarakat dan mungkin sulit ditemukan oleh wisatawan di tempat lain. Namun saat ini local genius memiliki ancaman plagiarisme oleh orang asing baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial, oleh karena itu pengelola pariwisata wajib untuk mendaftarkan aset lokal pada lembaga perlindungan hak agar aset lokal terlindungi dari hal-hal yang merugikan bahkan hal-hal yang dapat menghilangkan local genius (Sanjiwani, 2016).

#### 4. Keberlanjutan Sistem Manajemen

Untuk menjaga kebermanfaatan yang bersumber dari pariwisata maka potensi pariwisata harus dikelola dengan baik agar dapat mendatangkan manfaat yang berkesinambungan dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara konsisten. Untuk mewujudkannya tentu saja dapat dilakukan dengan musyawarah warga masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata yang akan menghasilkan kesepakatan dan pokok-pokok yang mendukung keberlangsungan sistem pengelolaan pariwisata sesuai dengan kebutuhan pariwisata.

Konsep keberlanjutan dalam sektor pariwisata merupakan suatu keniscayaan untuk menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu sangat dilarang untuk mengeksploitasi seluruh sumber daya alam dan manusia secara berlebihan sehingga tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan dalam kegiatan pariwisata, perlu diadakan pelatihan bagi generasi berikutnya dan melakukan kaderisasi agar ke depannya pengelolaan pariwisata dapat ditangani oleh sumber daya manusia yang handal dan terus memberikan dampak positif bagi kehidupan selanjutnya.

Pengelolaan pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat, pengelola pariwisata, atau badan usaha daerah yang pengelolaannya langsung oleh masyarakat

di bawah pengawasan pemerintah daerah setempat (Suganda, 2018). Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa berperan sebagai fasilitator dan penggerak dalam bidang perindustrian, pengelolaan dana, dan bantuan pemerintah pusat sehingga penyaluran dana kegiatan usaha dan hasil usaha dapat terlaksana dengan baik (Jenny, 2015). Manajemen pariwisata dengan konsep badan usaha desa juga digunakan untuk melatih kemampuan menjaga nilai-nilai dan mengorganisasikan peran yang diungkapkan dalam hubungan personal, kepercayaan dan tanggung jawab (Anggraeni, 2016). Maka dengan adanya keberlanjutan kegiatan pariwisata dan pengelolaannya, maka usaha ini akan terus berlanjut dan melahirkan kembali pengelolaan badan usahanya agar berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat serta generasi mendatang.

#### 5. Sistem Manajemen Ekonomi yang Baik

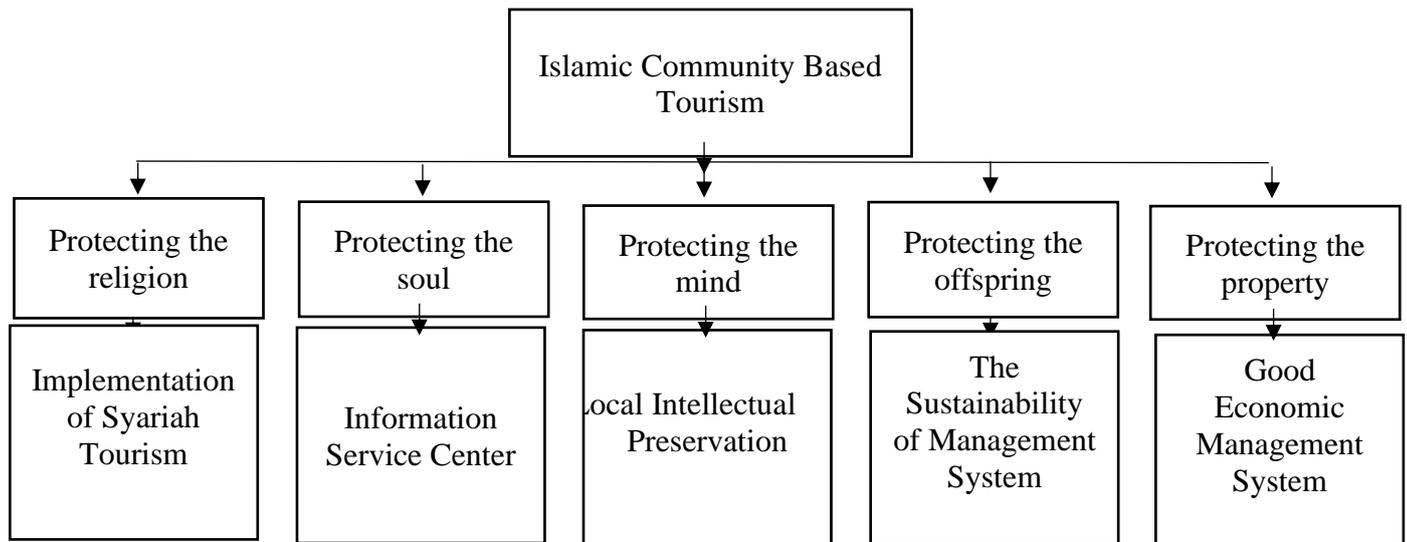
Tidak dipungkiri manusia memiliki sifat tamak ketika berhadapan dengan harta, maqoshid syariah memberikan jalan keluar agar distribusi ekonomi dapat merata dalam konsep CBT di masyarakat, dengan memberikan pembagian kerja kepada seluruh masyarakat sesuai dengan kemampuan, dimana hasil kerja tersebut merupakan produk jasa bagi wisatawan seperti biaya guide, biaya transportasi, homestay, berjualan kerajinan, dan lainnya. Dengan harapan adanya pembagian kerja tersebut akan memberikan distribusi pendapatan yang maksimal bagi seluruh masyarakat sekitar. Disamping itu untuk memberikan keberkahan di sisi perolehan, ICBT menganjurkan kepada seluruh pengelola kegiatan pariwisata untuk mengeluarkan zakat untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Bahkan dana yang terkumpul melalui zakat dapat disalurkan dalam rangka membiayai pendidikan para santri yang merupakan warga sekitar, sehingga jenjang pendidikan di daerah tersebut semakin tinggi dan dapat memajukan daerah setempat. Zakat sebagai instrumen pembiayaan pendidikan sekaligus menyalurkannya untuk Fii Sabilillah (yaitu jalan yang menyampaikan kepada rahmat Allah, baik berupa ilmu pengetahuan, maupun sedekah). Dan bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang berhak menerimanya, termasuk pula membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu agama dan lain-lain yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini hendaklah bagian guru-gurunya diberikan selama mereka menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yaitu selama mereka tidak mempunyai mata pencaharian lain (Rahim, 2013).

Model pembagian pendapatan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata akan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut melalui pengelolaan setelah kegiatan selesai.

Namun, pendapatan dari kegiatan pariwisata tidak semuanya dialokasikan kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di sektor pariwisata dengan memberdayakan mereka untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata (Suganda, 2018), dan bagi yang tidak memiliki kekuatan usaha akan mendapatkan manfaat dari zakat dan infaq dari kegiatan pariwisata.

Chart 2. Islamic Community Based Tourism Concept



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, selain itu pariwisata seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, namun kenyataan yang ada saat ini pariwisata lebih banyak dikelola oleh pengembang atau investor yang mementingkan bagaimana mendatangkan banyak pengunjung dan mendapatkan pemasukan tanpa melibatkan masyarakat setempat sebagai pengelola, sehingga masyarakat setempat tidak dapat menikmati pendapatan yang diperoleh dari pariwisata. Dalam mengatasi hal tersebut penulis berpendapat bahwa seharusnya ada keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata, sehingga akan terjadi pemerataan pendapatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia di daerah tersebut. Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam pengelolaan pariwisata adalah Community Based Tourism.

Pengelolaan pariwisata dengan menggunakan sistem Community Based Tourism telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung turut berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Penggunaan konsep ini selain memberikan dampak positif dalam segi ekonomi, secara tidak langsung juga memberikan dampak pada sisi yang lain, seperti melestarikan budaya, menjaga kelestarian alam, menjaga hubungan antar masyarakat sekitar. Dalam konsep Community Based Tourism juga terjadi interaksi antara masyarakat dengan wisatawan yang datang sehingga memungkinkan terjadinya pembelajaran budaya dan penyebaran budaya lokal kepada wisatawan dan masyarakat umum.

Penulis juga memberikan gambaran tentang pariwisata berbasis masyarakat Islam yang merupakan hasil penerapan maqoshid syariah terhadap community based tourism yang telah ada sebelumnya. Penerapan maqoshid syariah dalam konsep Community Based Tourism memberikan rekomendasi baru dalam penerapan konsep Community Based Tourism yang lama, rekomendasi tersebut adalah penerapan pariwisata syariah, pusat layanan informasi, pelestarian intelektual lokal, keberlanjutan sistem manajemen, dan sistem manajemen ekonomi yang baik. Sehingga dengan adanya Islamic Community Based Tourism selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara fisik, dan juga akan meningkatkan kesejahteraan spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES di Gunung Kidul Yogyakarta. *MODUS Volume 28 (2)*, 155-167.
- Chandralal, L., & Valenzuela, F. R. (2013). Exploring Memorable Tourism Experiences: Antecedents and Behavioural Outcomes. *ournal of Economics, Business and Management*, 177-181.
- Christou, P. A., Farmaki, A., Saveriades, A., & Spanuo, E. (2019). The “genius loci” of places that experience intense tourism development. *Tourism Management Perspectives*, Volume 30, 19-32.
- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. (2009). *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta.
- Gianina, I. S., Prasetya, A., & Dewantara, R. Y. (2016). Analisis Peran Tourist Information Centre (TIC) Terhadap Pengambilan Keputusan Wisatawan Mengunjungi Obyek dan Kawasan Wisata (Studi Pada TIC Malioboro, Yogyakarta). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 38 (1)*.
- Jenny. (2015, September 04). *Peran BUMDES Dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata*. Retrieved from berdesa.com: <https://www.berdesa.com/peran-bumdes-dalam-strategi-pengembangan-desa-wisata/>
- Kautsar, D. R., & Gunawan, M. P. (2017). Managing heritage tourism in Toraja: strengthening local values and improving tourists’ experiences. *Journal of Heritage Tourism* , 550-561.
- Kim, S., Whitford, M., & Arcodia, C. (2019). Development of intangible cultural heritage as a sustainable tourism resource: the intangible cultural heritage practitioners’ perspectives. *Journal of Heritage Tourism*, Volume 14, 422-435.
- Massis, A. D. (2015). Product Innovation in Family versus Nonfamily Firms: an Exploratory Analysis. *Journal of Small Bussiness Management Volume 53 (1)*, 1-36.
- Murdiyanto, E. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman* . SEPA.
- Rahim, A. (2013). *Panduan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf)*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika Press.
- Sanjiwani, P. K. (2016). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Pariwisata, Studi Kasus :

- Perlindungan Hukum Pemanfaatan Local Genius Dalam Produk Pengusaha Lokal.  
*Jurnal Ilmiah Hospitality Management Volume 7 (1)*.
- Soliman, M., & Cardoso, L. (2021). Mapping smart experiences in tourism: A bibliometric approach. *European Journal of Tourism Research*, 1-26.
- Suganda, A. D. (2018). Konsep Wisata Berbasis Masyarakat . *I-Economic Volume 4 (1)*.
- Syafi'i, M., & Suwandono, D. (2015). Tourism Village Planning Concept Approach Community Based Tourism (Case Study Bedono Village, Sayung, Demak). *Ruang Volume 1 (2)*, 51-60.
- Ulum, F. (2019). Inovasi Pariwisata Syariah Di Indonesia : Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Volume 15 (1)*, 119-136.